

# Laporan Penelitian

## MONITORING DAN EVALUASI INOVASI

1. SMART KIDS  
Kerjasama Penerbitan KIA dengan Sekolah
2. BAKULA  
Bakunjung Kula Warga Awayan
3. BU RT  
Buku Rumah Tangga
4. SOMBALIT BAJUNGKALING  
Sosialisasi Minat Baca dan Literasi Beserta Kunjungan  
Perpustakaan Keliling
5. TRECKK  
Tim Reaksi Cepat Ketentraman Ketertiban Umum



BAPPEDALITBANG  
KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT maha pencipta atas limpahan karunia-Nya, **LAPORAN PENELITIAN MONITORING DAN EVALUASI INOVASI** ini dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan pelaksanaan/ implementasi inovasi-inovasi di Kabupaten Balangan tahun 2021-2022, kendala dan permasalahan yang dihadapi selama implementasi program inovasi, mengukur efisiensi/ keberhasilan program dan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi program inovasi.

Penelitian ini disadari oleh penyusun masih banyak kekurangan karena keterbatasan tools/ alat/ metode dan indikator yang digunakan untuk mengukur, serta waktu pengukuran yang relatif masih singkat karena program baru berjalan selama 2 tahun. Alangkah baiknya kedepannya ditambahkan lagi indikator pengukuran dan waktu evaluasi supaya lebih terlihat lagi dampak dan manfaatnya (*impact*). Keterbatasan juga terjadi pada internal penyusun berupa waktu dan kemampuan, sehingga penyusun sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata penyusun menyampaikan rasa terimakasih serta penghargaan kepada seluruh pihak terlibat yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses penelitian ini. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Balangan, Desember 2022

Tim Penyusun

JF Peneliti Bappedalitbang

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
C. Manfaat Penelitian.....	4
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Inovasi sektor publik .....	6
B. Evaluasi Dampak .....	7
C. Pengukuran Dampak inovasi sektor publik.....	10
D. Kerangka Pikir.....	14
E. Operasionalisasi Konsep.....	15
III. METODE .....	18
A. Pendekatan Penelitian.....	18
B. Teknik Pengumpulan Data.....	18
C. Instrumen pengukuran.....	19
D. Kriteria Penentuan Sampling.....	19
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	20
IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN .....	23
1. Kerjasama Penerbitan KIA dengan Sekolah (SMART KIDS).....	23
2. Bakunjung KuLawarga Awayan (BAKULA) .....	33
3. Buku Rumah Tangga (BU RT).....	42
4. Sosialisasi Minat Baca dan Literasi Beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling (SOMBALIT BAJUNGKALING).....	51
5. Tim Reaksi Cepat Ketentraman Ketertiban Umum (TRECKK) .....	61

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penjelasan aspek Input, Proses dan Output .....	14
Tabel 2. Instrumen pengukuran dampak inovasi.....	15
Tabel 3. Rumus prosentase perubahan adalah sebagai berikut .....	20
Tabel 4. Perubahan Inovasi SMART KIDS .....	25
Tabel 5. Perubahan Inovasi BAKULA .....	34
Tabel 6. Perubahan Inovasi BU RT .....	43
Tabel 7. Perubahan Inovasi SOMBALIT BAJUNGKALING .....	53
Tabel 6. Perubahan Inovasi TRECKK .....	63

# I. PENDAHULUAN

---

## A. Latar Belakang

Visi Pemerintah Kabupaten Balangan adalah “**MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA, MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA**”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut misi yang diusung adalah

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Strategi yang diambil adalah

1. Meningkatkan konektivitas wilayah dan antar wilayah
2. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan ruang
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan saluran pengairan dan irigasi
4. Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur Perumahan Permukiman
6. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
7. Meningkatkan efektifitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan
8. Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup
9. Optimalisasi pengelolaan kenakeragaman hayati
10. Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan
11. Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa
12. Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
13. Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Investasi
14. Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka
15. Meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
16. Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah
17. Meningkatkan Usia Harapan Hidup

18. Menurunkan Angka Kematian Ibu
19. Menurunkan Angka Kematian Bayi
20. Menurunkan Prevalensi Stunting
21. Menurunkan Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun
22. Meningkatkan nilai SAKIP
23. Mempertahankan Opini BPK
24. Meningkatkan nilai EKPPD
25. Meningkatkan Indeks Pelayanan Publ
26. Meningkatkan Indeks Kepuasan
27. Penurunan angka kemiskinan
28. Meningkatkan Angka PPKS yang tertangani
29. Mempertahankan Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA
30. Meningkatkan Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum
31. Menurunkan Indeks Resiko Bencana
32. Meningkatkan Pengembangan Seni dan Budaya Balangan
33. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa

Kemudian diimplementasikan ke dalam beberapa program prioritas yakni sebagai berikut

1. Pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Pembangunan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Peningkatan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Inovasi daerah sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria inovasi daerah harus memenuhi sebagai berikut :

- a. Mengandung pembaharuan sebagian atau seluruh unsur inovasi
- b. Memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat
- c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan pembatasan pada masyarakat
- d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- e. Dapat direplikasi

f. Inovasi dibagi menjadi inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan bentuk inovasi daerah lainnya.

Tujuan inovasi daerah sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2017 adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk mencapai tujuan tersebut sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Prestasi inovasi Kabupaten Balangan adalah pada tahun 2021 nilai indeks inovasi daerah adalah 42,62 (inovatif), tahun 2022 meningkat menjadi 57,57 (inovatif). Namun untuk peringkat meningkat cukup tinggi yakni dari peringkat 166 menjadi peringkat 45 dari 508 kabupaten/ kota di Indonesia. Peningkatan prestasi yang cukup signifikan ini diperoleh dari peningkatan metode penjaringan inovasi daerah, pendampingan monitoring evaluasi pengisian data dukung kelengkapan inovasi sesuai indikator parameter Kemendagri, dan peningkatan kapabilitas dan keterampilan SDM inovasi (tim Klinik Inoba, Pamong Inovasi, Inovator dan Admin inovasi).

Monitoring ada evaluasi implementasi program menjadi salah satu indikator penilaian inovasi daerah, sebagaimana diketahui dalam juknis terbaru Kementerian Dalam Negeri bahwa indikator monitoring evaluasi mengukur kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah, dilihat dari a) hasil laporan monitoring evaluasi internal perangkat daerah, b) hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi survei kepuasan masyarakat, c) hasil laporan monitoring evaluasi eksternal berdasarkan hasil penelitian/ kajian/ analisis.

Keberhasilan program dapat diukur dengan cara a) menetapkan tujuan dan indikator sebagai alat ukur diukur untuk masing-masing tujuan tersebut, b) Mengumpulkan data berupa angka statistik, survei, wawancara, atau informasi lain yang relevan dengan tujuan program, c) Analisis Data untuk mengevaluasi hasil program, d) Evaluasi Kualitatif untuk mendapatkan umpan balik dari peserta program, stakeholder, atau pihak terkait melalui metode wawancara, tinjauan literatur, atau diskusi kelompok, e) Bandingkan data dan temuan dengan target yang telah ditetapkan, apabila telah mencapai tujuan yang ditetapkan atau memenuhi harapan yang diharapkan, jika ada ketidaksesuaian, identifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil tersebut, f) Perbaiki dan pelajari hasil evaluasi program untuk meningkatkan dan mengoptimalkan program di masa depan.

Tujuan dilaksanakannya evaluasi implementasi program inovasi adalah a) mengukur keberhasilan implementasi program inovasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, b) mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dengan melibatkan pengumpulan dan analisis data pada aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, c) mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dialokasikan untuk inovasi, melibatkan pengukuran biaya, waktu dan sumber daya untuk pelaksanaan inovasi, c) melingkatkan pembelajaran organisasi karena hasil analisis dan temuan

inovasi mengidentifikasi rekomendasi untuk membantu mengubah budaya dan proses organisasi untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan, d) mendukung pengambilan keputusan karena evaluasi program inovasi menyediakan informasi penting yang dapat dipergunakan pengambil keputusan terkait pengembangan dan inventarisasi di bidang inovasi.

Mempertimbangkan hal tersebut maka perlu dilaksanakan penelitian evaluasi implementasi inovasi daerah untuk mengukur keberhasilan, efisiensi dan efektivitas program inovasi guna memberikan masukan bagi pengembangan dan keberlanjutan implementasi program inovasi.

## **B. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah mengetahui efisiensi dan efektivitas implementasi program inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membantu kemudahan tata kelola pemerintahan Kabupaten Balangan.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi sebagai salah satu dampak dari implementasi inovasi dilihat dari tahap input, proses, output dan dampak
2. Mengetahui kelemahan/ hambatan/ kendala yang dihadapi dalam implementasi inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
3. Aspek-aspek apa saja yang mengalami perubahan sebagai dampak dari implementasi inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

## **C. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya SKPD, BLUD dan UPT Puskesmas yang telah melaksanakan inovasi terkait dengan implementasi program inovasi yang selama ini telah dilaksanakan
2. Mengetahui dan memberikan informasi mengenai area perbaikan inovasi di sektor publik
3. Teridentifikasinya aspek-aspek yang mempengaruhi capaian dampak inovasi dan rekomendasi langkah strategis yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan keberhasilan implementasi program inovasi

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Lokus pelaksanaan penelitian evaluasi dampak Inovasi adalah di Kabupaten Balangan khususnya terkait pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta inovasi bentuk lainnya yang menjadi urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

- a. Inovasi pelayanan publik yakni inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/ jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/ jasa publik
- b. Inovasi tata kelola pemerintahan merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- c. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi yang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (berdasarkan PP nomor 38 tahun 2017 pasal 5 tentang inovasi daerah).

Inovasi yang menjadi obyek penelitian adalah inovasi yang telah dilaksanakan minimal 2 (dua) tahun rentang tahun 2021 sampai 2022.

Pengukuran dampak dilakukan pada level mikro, yaitu pengukuran dampak inovasi pada tataran output yang dihubungkan dengan ada tidaknya perubahan yang terjadi dari setiap pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan dan inovasi bentuk lainnya.

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah

- a. Identifikasi perubahan sebelum dan setelah implemenasi inovasi
- b. Identifikasi faktor kelemahan/ hambatan/ kendala implementasi inovasi
- c. Menyusun rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga terkait agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi inovasi

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

---

### **A. Inovasi sektor publik**

Secara umum, inovasi dapat dipahami sebagai proses perubahan perilaku. Inovasi bergerak dalam ruang yang dinamis dan senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Menurut Everett M Rogers, inovasi adalah sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Begitu halnya dengan pandangan Albury (dalam suwarno, 2008 : 10) yang secara lebih sederhana mendefinisikan inovasi sebagai new ideas that work. Pengertian ini menekankan bahwa inovasi berhubungan erat dengan ide-ide baru (invention) yang bermanfaat. Mendefinisikan inovasi di sektor publik tidaklah sama dengan mendefinisikan inovasi di sektor privat. Inovasi tidak hanya menyangkut sesuatu yang baru, tetapi juga memberikan nilai tambah, baik dalam bentuk proses ataupun output dari suatu produk jasa/barang. Karena itulah, maka definisi sederhana dari inovasi sektor public adalah tentang bagaimana ide-ide baru itu bekerja untuk menciptakan nilai publik (OECD, 2014). Adapun karakteristik inovasi di sektor publik (OECD Observatory) adalah sebagai berikut:

- 1. Kebaruan:** inovasi memperkenalkan pendekatan baru, sesuai dengan konteks atau lingkungan di mana inovasi akan diterapkan
- 2. Implementasi:** inovasi harus dilaksanakan, bukan hanya sekedar ide
- 3. Dampak:** inovasi bertujuan untuk menghasilkan nilai publik yang lebih baik termasuk efisiensi, efektivitas, dan kepuasaan pengguna atau karyawan.

Kebijakan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah, dinyatakan bahwa "Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan tersebut diarahkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah". Selanjutnya dinyatakan bahwa inovasi daerah dapat berbentuk :

1. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, yang merupakan pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
2. Inovasi Pelayanan Publik, yang merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
3. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; yang merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

## B. Evaluasi Dampak

Dampak adalah hasil jangka panjang yang dihasilkan oleh suatu program, proyek atau kebijakan, termasuk hasil yang diharapkan dan tidak diinginkan terjadi, dampak positif dan negatif, serta dampak langsung dan tidak langsung (*Australian Gov; Department of industry, innovation, and science, 2015*). Identifikasi dampak ini bertujuan untuk melihat perbedaan utama dari suatu program atau kebijakan yang telah dilaksanakan berdasarkan tujuan pelaksanaan. Hal ini pula, yang oleh *International Fund for Agricultural Development (IFAD)* ikut mendefinisikan dampak sebagai cara untuk melihat pencapaian tujuan proyek atau program, atau lebih tepatnya terkait dengan kontribusi untuk pencapaian tujuan yang dilakukan yang keseluruhannya dapat ditempuh melalui satu instrumen pelaksanaan bernama impact evaluation atau evaluasi dampak.

Evaluasi dampak merupakan penyelidikan yang sistematis dan empiris terhadap dampak yang dihasilkan oleh suatu intervensi. Proses ini akan menentukan apakah suatu intervensi telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan dari program atau kegiatan atau tidak sama sekali. Selain itu, evaluasi dampak ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang berhasil atau tidak berhasil, bagaimana, untuk siapa, dan mengapa hal itu terjadi (*Impact Evaluation: A discussion paper for AusAID practitioners, 2012*). Evaluasi dampak dapat memberikan bukti secara nyata tentang dampak yang telah diproduksi (dampak yang diharapkan). Selain bukti yang kredibel tersebut, evaluasi dampak juga dapat mengarahkan pada inferensi kausal bahwa terjadinya perubahan sebagai bagian dari hasil pelaksanaan proyek, program atau kebijakan. Maka dari itu, Evaluasi dampak dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan untuk menilai perubahan-perubahan yang terjadi dalam kelompok sasaran, yang diakibatkan oleh program/proyek/kebijakan dan merupakan hasil dari kegiatan program/proyek/kebijakan.

Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Tangkilisan (2003:28), menyebutkan ada empat jenis evaluasi dampak yaitu :

1. Evaluasi *single program after-only*. Jenis evaluasi ini merupakan yang paling lemah karena tidak diketahui baik tidaknya suatu program terhadap kelompok sasaran, dan tidak diketahui juga kelompok sasaran sebelum menerima program.
2. Evaluasi *single program before-after*. Jenis ini dapat digunakan untuk mengetahui keadaan kelompok sasaran sebelum menerima program tetapi tidak dapat mengetahui efek dari program tersebut
3. Evaluasi *comparative after-only*. Merupakan evaluasi dengan cara membandingkan kelompok sasaran dengan kelompok bukan sasaran. Pada evaluasi jenis ini efek program terhadap kelompok sasaran tidak diketahui

4. Evaluasi *comparative before-after*. Merupakan gabungan dari ketiga kelompok diatas. Sehingga kelemahan yang ada diketiga desain diatas dapat diatasi oleh desain evaluasi ini.

Selain itu, ada pula jenis evaluasi dampak yang digunakan sebelum dan sesudah dan selama program dilaksanakan (*Australian Gov; Department of industry, innovation, and science, 2015*) yaitu :

1. *Ex post impact evaluation*, mengumpulkan data terkait actual impact
2. *Ex ante impact evaluation*, meramalkan kemungkinan dampak yang akan terjadi
3. *During implementation*, mengumpulkan data tentang kesesuaian dampak program yang dihasilkan dengan dampak yang diinginkan.

Patton dan Sawicky menguraikan 6 (enam) bentuk pendekatan evaluasi dasar yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi program, yaitu :

1. *Before and after comparisons*,

Pendekatan yang membandingkan kondisi (orang atau penduduk suatu daerah) sebelum dan sesudah program (*actual postprogram data*). Selain itu, pendekatan ini juga dapat digunakan untuk membandingkan kondisi masyarakat sesudah program dijalankan (*actual postprogram data*) dengan masyarakat yang tidak menjalankan program atau kebijakan tersebut.

2. *With and without comparisons*.

Pendekatan untuk membandingkan antara grup target yang menerima program dan yang tidak. Adapun batasan-batasan antara pendekatan ini dan pendekatan pada nomor satu diatas adalah perlunya pemilihan kelompok yang akan dibandingkan dengan tepat, adanya asumsi bahwa perubahan-perubahan yang diamati di tempat kejadian perkara dapat dikenali.

3. *Actual-versus-planned performance comparisons*.

Pendekatan ini membandingkan data pasca pelaksanaan program secara aktual pada sasaran program yang timbul pada periode waktu sebelumnya (biasanya sebelum implementasi program). Analis menentukan tujuan dan target yang spesifik untuk membuat kriteria evaluasi sebelum program dilaksanakan guna mengetahui periode waktu pelaksanaan program dan menentukan data yang dibutuhkan dari performa program yang dilaksanakan analis dalam hal ini membandingkan performa kebijakan secara actual terhadap kondisi masyarakat yang tidak menerima program.

4. *Experimental (controlled) models*

Pendekatan ini menggunakan konsep kontrol ekuivalen dan kelompok yang diuji cobakan serta ukuran-ukuran pra dan pasca pelaksanaan program. Unit analisis adalah individu dalam kelompok yang dipilih secara acak. Individu yang dimaksud adalah yang menerima atau

melaksanakan program dan tidak atau melaksanakan program yang berbeda dengan kelompok yang dijadikan kelompok uji coba.

#### 5. *Quasi-experimental models*

Pendekatan *Quasi-experimental models* mencoba mengukur hasil atau outcome dari program atau kebijakan melalui skor, angka atau indikator lainnya. Selain itu pendekatan ini juga mencoba untuk mempertahankan logika percobaan tanpa menggunakan suatu prosedur, teknik ataupun hal lainnya. Pendekatan ini memiliki 2 rancangan dasar yang dapat digunakan untuk melakukan analisis hasil pelaksanaan program terhadap target grup, yaitu rancangan non equivalent control group dan rancangan interrupted time-series design. Rancangan non equivalent control group melakukan perbandingan dari treatment group dan grup lainnya yang diujicobakan program, baik sebelum dan sesudah kebijakan atau program dilaksanakan. Adapun rancangan yang kedua melakukan perbandingan treatment grup dari waktu ke waktu baik sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Misalnya kondisi kelompok masyarakat sebelum pelaksanaan program diamati beberapa kali.

#### 6. *Cost-oriented approaches*

Pendekatan Cost-oriented approaches merupakan jawaban atas kondisi yang mengharuskan mengukur dampak kebijakan dalam satuan uang, estimasi biaya dan keuntungan bersih dari perubahan yang terdeteksi dari pelaksanaan program, mengukur keuntungan yang terlihat maupun tidak serta biaya yang harus dikeluarkan baik secara langsung atau uang, maupun tidak langsung (dampak buruk yang akan dirasakan kedepannya).

Kajian The World Bank tahun 2006 tentang *Conducting Quality Impact Evaluations Under Budget, Time And Data Constraints* mengemukakan bahwa ada berbagai pilihan desain evaluasi dampak dimulai dari metode yang terkuat hingga lemah yaitu:

1. *Pre- and post intervention project and control group design with randomized or non-randomized assignment.*

Desain ini merupakan desain evaluasi paling kuat yang mengkombinasikan evaluasi pre and post intervention dengan menggunakan data awal/dasar dan melibatkan perbandingan antar kelompok.

2. *Delayed pre-test/post-test comparison group design.*

Desain ini bermanfaat ketika proses evaluasi dimulai dalam jangka menengah. Hal ini karena desain ini tidak menggunakan data awal/dasar (baseline), namun lebih pada penguatan evaluasi mid-term dan post intervention.

3. *Pre-and post-intervention project group and post-intervention comparison group.*

Meskipun desain ini lebih lemah dari sebelumnya, namun desain ini memungkinkan untuk melihat perbandingan dari waktu ke waktu dan analisis transversal pasca proyek. Dalam desain ini tidak menggunakan preintervention terkait perbandingan kelompok, tetapi hanya menggunakan post-intervention.

4. *Post-intervention project and comparison groups with no baseline data.*

Desain evaluasi ini hanya memfokuskan pada evaluasi dampak terhadap post-intervention data proyek dan perbandingan antar kelompok dan tanpa menggunakan baseline data.

5. *Pre- and post-implementation project group analysis with no comparison group*

Desain ini menghilangkan analisis terhadap evaluasi dampak dengan kelompok pembanding, namun tetap menggunakan pre and post intervention untuk proyek kelompok dan baseline data.

6. *Post-intervention project group without baseline data or a comparison group.*

Ini merupakan desain evaluasi yang paling lemah karena memfokuskan proses evaluasi post intervention tanpa pre-intervention dan berdasarkan baseline data.

### C. Pengukuran Dampak inovasi sektor publik

Pengukuran dampak inovasi sektor publik cenderung lebih sulit daripada sektor privat (NESTA, 2011). Hal ini karena pengukuran di sektor publik tidak hanya dilakukan dari opertu keuangan semata, namun juga pada nilai publik yang dihasilkan. Menurut kajian NESTA, indeks inovasi sektor publik setidaknya mencakup empat bidang, yaitu :

1. *Improvement in organisational key performance indicators*
2. *Improvement in service evaluation*
3. *Improvement in efficiency*
4. *Improvement context*

Salah satu pengukuran dampak inovasi yang dilakukan di sektor publik misalnya dalam *Innovation in Public Sector Organisations, A Pilot Survey in measuring innovation across the public sector* yang dilakukan oleh *National Endowment for Science, technology, and the Arts (NESTA) of United Kingdom* pada tahun 2011. Survey ini menjadi stimulus untuk membuat indeks pengukuran inovasi organisasi sektor publik yang sangat berguna bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan institusi lainnya yang berhubungan dengan sektor publik. Jenis pengukuran inovasi yang dihasilkan dalam penelitian ini

adalah inovasi berupa jasa (dalam penelitian ini jasa dalam bidang kesehatan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner, indicator yang digunakan dalam kuesioner ini adalah mengadopsi *Private Sector Index Survey*. Adapun indikator-indikator tersebut berupa :

1. *Efficiency*, terkait dengan efisiensi biaya yang terjadi setelah adanya inovasi
2. *Quality*, terkait dengan kualitas dari layanan inovasi.
3. *Access to service*, terkait dengan akses pelayanan yang semakin mudah atau malah justru semakin sulit.
4. *Customer Feedback*, terkait dengan apakah terdapat ruang bagi konsumen untuk memberikan feedback dalam rangka peningkatan inovasi.
5. *Speed Of Delivery*, terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan untuk satu layanan tertentu.
6. *Range Of Services*, terkait dengan seberapa jauh jangkauan pelayanan yang diberikan setelah inovasi.

Pengukuran dampak inovasi sektor publik lainnya juga dilakukan SEAT (*Socio Economic Assesment Toolbox*) yang merupakan sebuah perangkat penelitian yang digagas oleh *Government and Social Affairs*, Pemerintah Inggris pada tahun 2012 untuk menilai seberapa besar dampak dari sebuah inovasi kebijakan pemerintahan terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat yang diafirmasikan ke dalam kebijakan ini. Penelitian tersebut menilai dengan cara yang holistik dengan asumsi bahwa kelima indikator bisa sesuai dengan tahapan implementasi inovasi. Pada studi kasusnya, kebijakan pemerintah Inggris yaitu dengan mendorong terbentuknya kelompok pekerja yang berlatar belakang Anglo American, untuk bisa diakselerasi tingkat perekonomian di daerah dekat pertambangan, sekaligus mengubah sosial-kultural masyarakat yang pasif akan kondisi ekonomi. Metode yang digunakan untuk menilai keberhasilan adalah dengan metode kualitatif, dengan melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan kelompok pekerja tersebut. Tujuan FGD tersebut yaitu untuk menilai seberapa jauh indikator tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuannya. Adapun indikator tersebut sebagai berikut :

1. *Inform*, Memberikan informasi yang seimbang dan objektif terkait adanya inovasi kepada stakeholders dengan tujuan awareness
2. *Consult*, Memberikan informasi yang seimbang dan objektif terkait adanya inovasi kepada stakeholders dengan tujuan pemahaman.
3. *Involve*, Melibatkan secara langsung stakeholders dengan tujuan mendapatkan feedback dan alternative inovasi.

4. *Collaborate*, Merumuskan sebuah inovasi bersama stakeholders dengan menjamin berjalannya aspirasi, ide, dan gagasan.
5. *Empower*, Memberdayakan secara mandiri stakeholders untuk dapat menjalankan inovasi dengan tujuan sustainability.

Di berbagai negara, pengukuran dampak inovasi tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah. TEKES (*The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation*) yang merupakan sebuah badan atau organisasi di Finlandia turut serta berkontribusi dalam melakukan berbagai pengukuran dampak inovasi yang bidangnya fokus pada *financing research, development and innovation*. TEKES saat ini telah mendukung berbagai kegiatan inovasi yang luas di bidang riset, industri dan sektor jasa. Tujuannya agar program bidang penelitian, pengembangan dan inovasi dapat menciptakan keuntungan jangka panjang bagi ekonomi dan sosial masyarakat. Salah satu indikator pengukuran dampak inovasi yang dihasilkan bernama Tekes Model. Tekes model ini pernah digunakan oleh beberapa organisasi yang juga bergerak disektor pengembangan inovasi khususnya pada sektor privat yang juga berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat, seperti *GAP (Global Access Program)* di *University of California* dan VINNOVA yang merupakan organisasi di Swedia yang berfokus pada pengukuran dampak pertumbuhan berkelanjutan di Swedia.

TEKES mengembangkan sebuah *General logic model for innovation* yang didalamnya mengukur dampak inovasi. Model ini membagi dampak inovasi kedalam tiga garis besar yaitu *immediate Impacts, Intermediate Impacts* dan *Ultimate Impacts*.

#### 1. *Immediate Impacts*

*Immediate impacts* menekankan pada konteks *increased resources or capabilities*. Dari konteks ini dapat dijabarkan sejumlah indikator berdasarkan pada ide/gagasan inovasi yang dikembangkan. Berikut indikatornya:

- *Information and advice*

Dampak ini berfokus bagaimana kemampuan inovasi dapat memberikan informasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan suatu *feedback* terhadap penyelenggara inovasi yang dinamakan sebagai *advice* (saran).

- *Competence*

Indikator ini berfokus pada sejauh mana inovasi telah menghasilkan peningkatan kemampuan dan keahlian pada individu atau masyarakat.

- *On raising capital / Strengthened Resource*

Terkait dengan peningkatan modal dan penguatan sumber daya yang dimiliki suatu daerah

- *Business linkages with service providers*

Jika dalam sector privat menekankan pada bagaimana hubungan bisnis dengan penyedia layanan, maka untuk sektor publik dapat menekankan pada hubungan penyedia layanan dan masyarakat terkait dengan program inovasi.

- *On selling in new markets*

Inovasi dapat berdampak pada terbukanya jaringan pasar/markets baru bagi masyarakat sebagai akibat dari program inovasi

## 2. *Intermediate Impacts*

Kunci utama dari *Intermediate impacts* menekankan pada *improved performance*. Indikator ini bertumpu pada konteks peningkatan kinerja sebagai bagian dampak inovasi. Adapun indicator yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- *Increased revenues*

Terkait dengan terjadinya peningkatan pendapatan rata-rata baik individu atau masyarakat

- *Increased employment*

Terbukanya lapangan kerja dan kesempatan bekerja bagi masyarakat yang lebih luas.

- *New products and service*

Dampak inovasi terkait dengan adanya produk baru yang dihasilkan yang memiliki nilai lebih dari sebelumnya. Begitu halnya dengan kualitas pelayanan yang lebih mudah, murah, nyaman, tidak berbelit-belit, dapat diakses, dan sebagainya.

- *Productivity*

Dampak inovasi terkait dengan terjadinya peningkatan produktivitas kinerja dalam masyarakat

- *Reduced environmental impact*

Kemampuan inovasi terkait juga pada sejauh mana inovasi dapat mengurangi dampak lingkungan yang dapat mungkin menyebabkan produktivitas masyarakat berkurang.

- *Increased investment and collaboration*

Inovasi dapat menyebakan peningkatan investasi atau penanaman modal dan juga pihak lain untuk turut terlibat berkolaborasi terhadap program inovasi

- *Renewal of Business/organizational structures*

Terkait dengan proses perubahan dan pembaharuan struktur organisasi, kewenangan, tugas dan fungsi yang sesuai dengan konteks program inovasi

## 3. *Ultimate Impacts*

*Ultimate Impacts* menekankan pada konteks *socio-economic benefit* yang dihasilkan oleh program inovasi. Adapun sejumlah indikator yang dapat dijabarkan berupa :

- *Sustainable wealth and job*

Terjadi peningkatan kekayaan dan lapangan pekerjaan secara berkelanjutan

- *Environmental and health care improvement*

Terciptanya lingkungan yang nyaman dan perbaikan serta peningkatan tingkat kesehatan masyarakat

- *Regional Viability/vitality*

Inovasi berdampak pada meningkatnya angka harapan/kesempatan hidup di suatu wilayah atau daerah

- *Safety and security*

Dampak inovasi terkait dengan rasa aman dan jaminan keamanan bagi masyarakat

- *Social well-being*

Inovasi memberikan dampak pada kemandirian dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

#### D. Kerangka Pikir

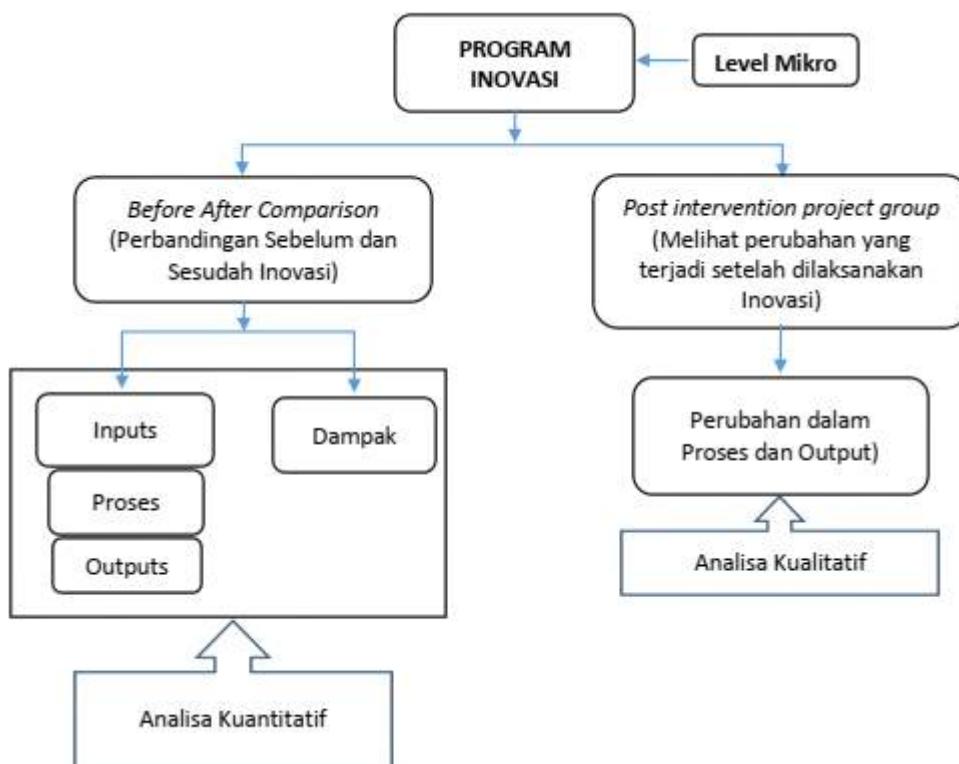
Pengukuran dampak inovasi dilakukan untuk mengetahui dampak dari suatu program inovasi yang telah berjalan. Dalam pelaksanaan ini, pendekatan evaluasi yang digunakan menggunakan pendekatan before after comparison (Patton and Sawicky) yang dikombinasikan dengan pendekatan *Post intervention project group without baseline data or a comparison group (World Bank)*. Pada pendekatan before after comparison, program inovasi akan diukur dengan membandingkan kondisi sebelum inovasi dan sesudah inovasi dilaksanakan. Pendekatan *Post-intervention project group without baseline data or a comparison group*, pendekatan evaluasi yang langsung memfokuskan pada ada/tidaknya perubahan yang ditimbulkan dari suatu proses tanpa melibatkan penggunaan baseline data ataupun perbandingan antar grup dalam proses pengukuran dampak inovasi. Pendekatan *before after comparison*, dioperasionalkan dengan menggunakan pembandingan kelompok indikator seperti: **input dengan input, proses dengan proses, dan output dengan output**. Indikator dalam masingmasing kelompok, adalah:

Tabel 1. Penjelasan aspek Input, Proses dan Output

<b>INPUT</b>	<b>PROSES</b>	<b>OUTPUT</b>
1. Biaya/anggaran/dana; 2. Sumber Daya Manusia; 3. Kelengkapan yang menjadi pendukung proses.	1. Mekanisme/ prosedur yang dilakukan; 2. Waktu layanan	1. Produktivitas; 2. Kualitas hasil

Pendekatan Post-intervention project group without baseline data or a comparison group diukur berdasarkan pada **dampak/perubahan yang terjadi** (yang langsung bisa dilihat dari data atau wawancara/testimoni). Pendekatan ini digunakan terhadap kondisi perubahan yang dirasakan oleh pelaku atupun pihak lain, namun tidak memiliki data sebelumnya yang bisa dijadikan pembanding secara kuantitatif. Oleh karena itu, hasil pengukuran dari pendekatan ini lebih bersifat kualitatif yang didasarkan pada deskripsi hasil wawancara atau testimoni. Alur pikir untuk melakukan pengukuran dampak inovasi ini, digambarkan dalam skema alur sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir Pengukuran Dampak Inovasi



#### E. Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka untuk mengoperasionalkan indikator-indikator pengukuran dampak inovasi ini, diuraikan lebih lanjut dalam bentuk operasionalisasi konsep pengukuran yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan instrumen pengukuran dampak inovasi. operasionalisasi variabel dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Instrumen pengukuran dampak inovasi

Variabel	Indikator	Dimensi Konseptual	
Input	Biaya/ Anggaran	Biaya Langsung	Biaya yang dikeluarkan oleh penerima layanan (biaya administrasi/ tarif layanan)
		Biaya tidak langsung	Biaya modal yang dikeluarkan untuk usaha atau menghasilkan produk
			Biaya yang dikeluarkan oleh penerima layanan untuk memperoleh produk layanan seperti: biaya transport, akomodasi, dll.

Variabel	Indikator	Dimensi Konseptual	
	SDM Pelaksana	Jumlah	Jumlah SDM yg terlibat dalam penyelenggaraan layanan (jumlah pegawai yang terlibat dalam alur 1 jenis layanan)
	Kelengkapan kerja	Peralatan/ fasilitas pendukung kinerja pelayanan	Peralatan & perlengkapan yg mendukung penyelenggaraan pelayanan (komputer, mobil, atk, meja, ketersediaan ruangan atau bangunan khusus, dll)
Proses	Mekanisme	Prosedur penerapan layanan	Persyaratan mendapatkan layanan dan unit layanan yg dilalui.
		Metode mendapatkan layanan	Cara yg dilakukan untuk mendapatkan pelayanan (online/offline, pendelegasian wewenang, jemput-bola, pesan antar, dll)
	Waktu layanan	Waktu pelayanan	Seberapa lama waktu yg digunakan untuk menghasilkan pelayanan.
Output	Produktivitas	Jumlah layanan yang dihasilkan	Jumlah layanan yg dihasilkan dalam Periode waktu tertentu (perjam/hari/bulan) atau, Jumlah penerima layanan publik yang dapat dilihat dari; jumlah pemohon, jumlah pengunjung, dsb.
		Jumlah produksi usaha	Omzet produksi usaha masyarakat.
	Kualitas	Kualitas mutu layanan	Mutu produk layanan. Bisa dilihat dari kualitas produk hasil layanan; Survey Kepuasan Masyarakat; atau analisa atas tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya, dan prosedur layanan
		Kualitas produk usaha masyarakat	Perubahan mutu produk usaha masyarakat (misal; kualitas rasa, pengemasan, metode pengiriman, dsb)
Dampak	Pendapatan pemerintah	Jumlah pendapatan pemerintah daerah	Jumlah pendapatan pemerintah daerah yg diperoleh dari inovasi (pendapatan daerah; pajak, retribusi masyarakat)
	Tingkat kesejahteraan masyarakat	Jumlah pendapatan masyarakat	Jumlah pendapatan yang diperoleh masyarakat setelah mendapatkan program inovasi (penghasilan, laba usaha)
		Perubahan kondisi kemiskinan	Perubahan indikator statistik kemiskinan di daerah tersebut.
	Penyerapan tenaga kerja	Penyerapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yg terserap setelah dilaksanakan inovasi
	Tingkat kesadaran/ perubahan pola pikir	Perubahan pola pikir/ kesadaran/ kedisiplinan pegawai pemerintah	Perubahan pola berpikir atau peningkatan kesadaran atau kedisiplinan pegawai pemerintah atas suatu isu/ permasalahan di organisasi
		Perubahan pola pikir/ kesadaran/ kedisiplinan masyarakat	Perubahan pola berpikir atau peningkatan kesadaran atau kedisiplinan masyarakat atas suatu isu/ permasalahan di daerah.
	Peningkatan pengetahuan atau keterampilan	Peningkatan pengetahuan atau keterampilan masyarakat	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat

Sumber : Pengukuran Dampak Inovasi, LAN, 2018



### **III. METODE**

---

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Kegiatan Pengukuran Dampak Inovasi merupakan aktivitas evaluasi dampak program inovasi yang telah diimplementasikan oleh SKPD/ Unit Kerja pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan berbasis kuantitatif dan kualitatif (eksplorasi) dengan memilih metode *before after comparison* (kuantitatif) dan *Post Test Without Comparison Group and Baseline Data* (kualitatif). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori atau instrument yang ada sebagai bahan penjelasan dan berakhir dengan sebuah teori. Penelitian ini bersifat objektif karena aspek terpenting dalam paradigma penelitian post-positivistis adalah sikap objektif dimana peneliti harus menguji kembali metode-metode dan kesimpulan-kesimpulan yang sekiranya mengandung bias (Creswell, 2010: 10)

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam kegiatan pengukuran dampak inovasi, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan antara lain :

- a. **Studi Literatur**, merupakan teknik pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal maupun bahan bacaan tertulis lainnya yang terkait dengan penentuan instrumen untuk pengukuran dampak inovasi. Dalam hal ini, studi literatur yang dilakukan adalah mengumpulkan teori-teori mengenai dimensi atau aspek pengukuran dampak inovasi terdahulu.
- b. **Focus Group Discussion (FGD)**, Irwanto (2006: 1-2) mendefinisikan FGD adalah suatu proses pengumpulan data primer dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Permasalahan yang dibahas dalam FGD sangat spesifik karena untuk memenuhi tujuan yang sudah jelas. Oleh karena itu, pertanyaan yang disusun dan diajukan kepada para peserta FGD jelas dan spesifik. Dalam kegiatan ini FGD dilakukan dengan memberikan arahan mengenai pengisian instrumen pengukuran dampak inovasi dimulai dari Judul, deskripsi, kegiatan, tujuan dan manfaat, serta deskripsi before-after inovasi berdasarkan masing-masing instrumen.
- c. **Wawancara mendalam**, Wawancara-Mendalam (In-depth Interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa

menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006: 72). Dalam kegiatan pengukuran dampak inovasi, setelah dilakukan FGD, peneliti menentukan inovasi yang dipilih untuk dilakukan wawancara dan observasi lapangan serta memilih instrumen yang paling berdampak terhadap stakeholders serta menyusun pedoman wawancara.

- d. **Observasi lapangan**, Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-participant. Artinya, penulis melaksanakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian akan tetapi tidak ikut serta dalam proses kerja. Pengamatan dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap fenomena dari objek yang diukur. Pengamatan dilakukan dalam rangka merekam keadaan, kegiatan, dan kejadian-kejadian di lapangan yang berkaitan dengan instrumen pengukuran dampak inovasi.

#### C. Instrumen pengukuran

Instrumen yang digunakan untuk menggali data adalah:

- a. **Angket**, Angket merupakan teknik sekaligus instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selain itu, angket juga digunakan sebagai panduan untuk melakukan wawancara dan observasi.
- b. **Data Sekunder**, Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

#### D. Kriteria Penentuan Sampling

Sampling untuk pengukuran dampak inovasi ini, dibagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu: Sampling untuk lokus dan sampling untuk jenis inovasi yang akan diukur. Penentuan sampling tersebut, didasarkan pada sejumlah kriteria seperti:

- a. Merupakan inovasi yang digagas oleh pemerintah daerah yang sampai saat ini masih berjalan dan telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 tahun.
- b. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah mereka yang pernah terlibat dalam penyelenggaraan Laboratorium Inovasi tahun 2015-216.
- c. Inovasi yang memiliki klasifikasi :
  - Pelayanan Publik, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

- Tata Kelola Pemerintahan merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- Inovasi Daerah Lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Pasal 5 tentang Inovasi Daerah). Dalam kegiatan Pengukuran Dampak Inovasi, Inovasi Daerah Lainnya yaitu Inovasi Pemberdayaan Masyarakat.

Kemudian dalam mengumpulkan sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu informan yang dipilih dengan sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang diinginkan peneliti dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Adapun kriteria informan dalam pengukuran dampak inovasi ini, adalah :

- a. Pelaksana inovasi, merupakan orang yang melaksanakan pekerjaan baik sebelum maupun sesudah adanya inovasi, baik dari unsur pemerintahan maupun masyarakat atau LSM.
- b. Pengagas inovasi, orang atau pihak yang pertamakali memunculkan ide/gagasan inovasinya sehingga dipanang sebagai salah satu yang paling memahami program inovasi tersebut.
- c. Jajaran pimpinan OPD yang terlibat secara langsung dalam proses inovasi di lingkungannya.
- d. Penerima atau sasaran inovasi, yaitu pihak yang terlibat sebagai pengguna atau yang terdampak dari proses inovasi. Puhak ini bisa dari unsur masyarakat ataupun unsur pemerintahan.

#### E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses dan interpretasi data dari hasil pengolahan data agar memiliki makna dan informatif. Dalam penelitian ini, semua data dan mendalam, observasi, serta studi literatur, diolah dan dianalisis untuk kemudian disajikan secara deskriptif.

**Pengolahan data** Sebelum tim pengukuran melakukan proses pengumpulan data di lapangan, terlebih dahulu ditentukan lokus dan jenis inovasi yang akan dijadikan sampel. Berdasarkan hasil pengumpulan sampel yang terkait dengan jenis inovasi, Tim melakukan pengklasifikasian terhadap jenis inovasi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: Tata Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya, Proses pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui FGD dan wawancara mendalam (depth interview). Hasil wawancara diseleksi dan diambil data yang relevan dengan fokus penelitian yaitu pengukuran dampak inovasi, yang kemudian diikuti dengan pengklasifikasian data ke dalam tiga jenis inovasi yakni jenis inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan, dan inovasi pemberdayaan masyarakat.

b. Display Data

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data untuk proses penyajian data dalam bentuk tulisan, tabel, serta kutipan hasil wawancara setelah pereduksian data selesai. Kemudian dirangkum secara sistematis agar mudah difahami.

c. Verifikasi Data

Verifikasi yaitu penarikan kesimpulan terhadap kesimpulan yang telah diambil tentunya dengan data banding dari hasil pengumpulan data. Proses verifikasi dapat dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu proses check dan recheck antara satu sumber dengan sumber lainnya. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan, sehingga dapat dicocokan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-umsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang ada.

### Teknik Analisa Data

a. *Before After Comparison*

Pendekatan untuk mengukur dampak dengan cara membandingkan kondisi (orang atau penduduk suatu daerah) sebelum (before) dan sesudah (after) program inovasi (actual postprogram data). Selain itu, pendekatan ini juga dapat digunakan untuk membandingkan kondisi masyarakat sesudah program inovasi dijalankan (actual postprogram data). Adapun cara untuk melihat dampak inovasi dilakukan dengan menghitung perbandingan dari indikator input, proses, dan output berdasarkan data-data sebelum dan sesudah inovasi dilaksanakan.

Rumus persentase perubahan :

Tabel 3. Rumus prosentase perubahan adalah sebagai berikut

$\left( \frac{x - y}{y} \right) \times 100\%$	Untuk Perhitungan apabila kondisi pasca inovasi lebih kecil dibandingkan sebelum inovasi, namun menunjukkan derajat nilai perubahan Positif (efektif – efisien). Misalnya: Waktu, Jumlah SDM, Biaya.
$\left( \frac{y - x}{x} \right) \times 100\%$	Untuk Perhitungan apabila nilai pasca inovasi lebih besar dibandingkan sebelum inovasi, dan menunjukkan derajat nilai perubahan Positif. Misalnya: untuk nilai Output, produksi, dsb. Atau dengan rumus:

$\left(\frac{Y}{X}\right) \times 100\%$	Untuk penghitungan nilai kinerja atau produktivitasnya.
$\bar{X} \frac{I + P + O}{3} \times 100\%$	Perhitungan Dampak Program Inovasi dihitung dari rata-rata nilai dampak Input, Proses, dan Output. Penghitungan ini dilakukan apabila data dampak yang ditimbulkan tidak diperoleh di dalam data lapangan.

Keterangan :

X = Keadaan sebelum inovasi

Y = Keadaan setelah Inovasi

I = Input

P = Proses

O = Output

$\bar{X}$  = Rata - rata

#### b. Post Intervention Project Group

*Post Intervention Project Group Post-Intervention* merupakan desain evaluasi untuk mengukur dampak dengan cara menggali data setelah program dilaksanakan tanpa harus membandingkan data sebelum program dilaksanakan. Pengukuran dampak dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai data kualitatif seperti wawancara dengan *key informan*, FGD, data-data program, dan data statistik dari instansi inovator.

## **IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN**

### **1. Kerjasama Penerbitan KIA dengan Sekolah (SMART KIDS)**

#### **1.1 Deskripsi Inovasi**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pasal 2 mengamanatkan bahwa tujuan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 14 ayat (4) "Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana salah satu perubahan mendasarnya adalah semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas.

Permasalahan yang melatarbelakangi inovasi SMART KIDS adalah kepemilikan KIA sebagai identitas penduduk berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah belum begitu populer di kalangan masyarakat. Hal ini mungkin karena manfaat yang didapatkan dari memiliki KIA belum begitu dirasakan oleh masyarakat khususnya di daerah perdesaan. Masyarakat menganggap bahwa memiliki KIA belum begitu penting (sebagaimana diketahui bersama bahwa masih adanya paradigma di masyarakat dimana baru mengurus dokumen kependudukannya saat terkendala dalam pelayanan publik lainnya).

Berbeda halnya dengan masyarakat di kota besar, dimana memiliki KIA dapat memberikan banyak manfaat baik itu dalam hal kemudahan akses pelayanan publik dan kemudahan/kenyamanan lain yang diberikan oleh dunia usaha. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan khususnya KIA ditengarai juga menjadi salah satu penyebab masih rendahnya kepemilikan KIA di Kabupaten Balangan.

Seperti halnya KTP elektronik, KIA merupakan dokumen kependudukan yang belum dapat dicetak mandiri oleh penduduk. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan dimana seluruh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil selain KTP elektronik dan KIA, dicetak dengan kertas HVS warna putih ukuran A4 80 gram

Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa hal yang membuat kepemilikan KIA di Kabupaten Balangan masih terbilang rendah, diantaranya:

1. Kurangnya sosialisasi terhadap pentingnya dokumen kependudukan khususnya KIA yang berakibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus KIA bagi anak-anak mereka;
2. Permasalahan jarak dan waktu dalam mengurus KIA;
3. Walaupun lebih praktis, layanan online tetap harus datang ke kantor Disdukcapil untuk pengambilan dokumen KIA;
4. Masih terdapat anak dibawah usia 17 tahun yang belum memiliki akta kelahiran;
5. Layanan jemput bola masih menjadi primadona bagi masyarakat.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas DUKCAPIL Kabupaten Balangan tahun 2020, prosentase kepemilikan KIA di Kabupaten Balangan berada pada 23,50%. Dari wajib KIA sebanyak 38.445 baru sebanyak 9.033 yang telah memiliki KIA. Berdasarkan permasalahan di atas, Pemerintah daerah harus melakukan inovasi agar kepemilikan KIA di Kabupaten Balangan semakin meningkat.

Ibu strategis yang diangkat adalah di dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tidak secara khusus mengatur manfaat dan kegunaan KIA. Pemanfaatan KIA ini diserahkan kepada masing-masing daerah untuk mengembangkan inovasinya dalam rangka pemanfaatan KIA tersebut. Di beberapa daerah, kepemilikan KIA memberikan manfaat yang luar biasa namun tidak sedikit daerah yang mengesampingkan manfaat KIA tersebut. Dari minim manfaat inilah pencapaian penerbitan KIA tidak maksimal dan daerah seolah-olah hanya menjalankan amanat dari Permendagri saja tanpa melihat outcome dari kepemilikan KIA tersebut.

Secara umum, beberapa manfaat KIA adalah sebagai berikut:

1. Melindungi pemenuhan hak anak;
2. Menjamin akses sarana umum;
3. Mencegah terjadinya kejadian-kejadian yang terjadi kepada anak misalnya perdagangan anak;
4. Menjadi bukti identifikasi diri ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anak;
5. Memudahkan anak mendapatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan dan transportasi.

Rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Balangan masih sebesar 68,89%. Prosentase ini dapat dikatakan belum maksimal. Untuk itu, inovasi-inovasi

layanan sangat diperlukan guna mendongkrak prosentase kepemilikan dokumen agar semakin meningkat. Inovasi-inovasi layanan yang langsung tepat sasaran, lebih efektif dan efisien.

Metode dan strategi pemecahan masalah yang ditawarkan bahwa sebelumnya upaya yang dilakukan sebelum inovasi yakni pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan dilakukan dengan cara tatap muka dan melalui aplikasi whatsapp. Pelayanan secara tatap muka menjadi kendala bagi penduduk yang tidak memiliki waktu yang fleksibel, memerlukan biaya transportasi, dan memerlukan antrean. Pelayanan melalui whatsapp memiliki beberapa kelemahan diantaranya tidak dapat mengurut pelayanan berdasarkan urutan permohonan yang masuk, chat pada whatsapp bisa terhapus dengan sendirinya, satu nomor layanan whatsapp tidak dapat diakses oleh banyak petugas operator.

Sementara itu upaya yang dilakukan setelah inovasi karena sebagian besar wajib KIA berstatus pelajar, bekerjasama dengan sekolah-sekolah merupakan langkah yang paling efektif untuk meningkatkan kepemilikan KIA di Kabupaten Balangan. Terlebih lagi, sebagian besar data siswa (akta kelahiran dan Kartu Keluarga) sudah terkumpul di sekolah. Melakukan kerjasama dengan sekolah membuat pengumpulan data pengajuan penerbitan KIA semakin mudah. Inovasi penerbitan KIA yang bekerjasama dengan sekolah ini kemudian diberi nama Smart Kids.

Aktor inovasi Smart Kids bertugas melakukan koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait serta pihak sekolah yang menjadi sasaran dari pelaksanaan inovasi, menyusun tim pelaksana yang bertugas untuk membantu pengambilan pas foto siswa ke sekolah sampai pada penyerahan KIA yang telah dicetak.

Tim pengelola/pelaksana inovasi SMART KIDS bertugas dalam hal teknis penerbitan KIA mulai dari pengumpulan berkas pengajuan penerbitan KIA, melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas pengajuan, Manajemen pas foto KIA (pengambilan pas foto/ pemindaian dan editing pas foto), entry data melalui aplikasi SIAK, pencetakan KIA, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan inovasi SMART KIDS ini melibatkan beberapa aktor dan jejaring yaitu: Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Camat.

Keunggulan dan kebaharuan dari inovasi SMART KIDS adalah:

1. Penduduk tidak perlu mendatangi kantor Dinas DUKCAPIL untuk mengajukan penerbitan KIA;
2. Pengumpulan berkas pengajuan penerbitan KIA lebih mudah karena sebagian besar sudah tersedia di sekolah;
3. Berkas pengajuan penerbitan KIA diajukan secara kolektif oleh pihak sekolah;
4. KIA yang sudah dicetak diserahkan kembali kepada pihak sekolah untuk didistribusikan kepada siswa yang bersangkutan;

5. Kepemilikan KIA meningkat;
6. Salah satu upaya pencegahan penularan virus covid-19.

Tahapan Inovasi SMART KIDS meliputi sebagai berikut

1. Persiapan terdiri dari a). Sosialisasi pelaksanaan inovasi; b). Koordinasi dengan stakeholder terkait dan kepala sekolah; c). Persiapan sarana dan prasarana; c). Penyediaan blangko dan ribbon; e). Ujicoba pelaksanaan inovasi pada beberapa sekolah dilaksanakan pada bulan Desember 2020; f) Pelatihan operator.
2. Penetapan yakni telah ditetapkan SK Kepala Dinas Nomor 471/68/DUKCAPIL-BLG/Tahun 2021 tanggal 01 Februari 2021
3. Pelaksanaan terhitung dari 10 Februari 2021 dengan tahapan pelaksanaan adalah a). Pengumpulan berkas kelengkapan; b) Proses verifikasi; c) Entry data dan pencetakan; d) Publikasi, e) Monitoring dan evaluasi.

Inovasi SMART KIDS bertujuan:

1. Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dokumen identitas penduduk (KIA);
2. Semakin mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;
3. Mengenalkan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sejak dini;
4. Menjalin kerjasama dengan stakeholder lain untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan;
5. Mendongkrak prosentase kepemilikan KIA di Kabupaten Balangan.

Adapun beberapa manfaat untuk inovasi Smart Kids antara lain

1. Terpenuhinya hak konstitusional penduduk dengan kepemilikan KIA;
2. Meningkatnya prosentase kepemilikan dokumen kependudukan khususnya KIA di Kabupaten Balangan;
3. Tepat guna, dan tepat sasaran.
4. Efisien, cepat, berbiaya murah (low cost).

Hasil Inovasi ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepemilikan KIA meningkat dari 23,50% di tahun 2020 menjadi 55,37% pada tahun 2021.
2. Predikat indeks kepuasan masyarakat meningkat dari nilai 3,32 pada Tahun 2021 menjadi 3,37 di Tahun 2022.

## 1.2 Data Perubahan

Berikut ini merupakan ringkasan perubahan sebelum dan sesudah ada inovasi SMART KIDS

Tabel 4. Data Perubahan pada inovasi SMART KIDS

Indikator	Deskripsi Perubahan
Tingkat/ prosentrase kepemilikan KIA Kabupaten Balangan	Dari jumlah sekolah yang ditargetkan menjadi locus program SMART KIDS tahun 2021-2022 sebanyak 115 sekolah (44 sekolah tahun 2021 dan 71 sekolah tahun 2022). Dari lokus tersebut telah diterbitkan di tahun 2021 sebanyak 3.796 KIA, dan di tahun 2022 sebanyak 3.137 KIA. Melalui inovasi SMART KIDS dihasilkan yakni tingkat kepemilikan KIA meningkat dari sebelumnya 23,50% tahun 2020 menjadi 55,37% pada tahun 2021, dan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 64,23%
Tingkat Kepuasan Masyarakat Meningkat	Melalui laporan Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan Semester II Tahun, dengan jumlah Responden yang mewakili menilai pelayanan KIA sebesar 1,99% atau 9 orang menghasilkan kesimpulan secara umum pelayanan administrasi kependudukan dari 9 unsur cenderung menilai baik dan sangat baik. Nilai indeks kepuasan masyarakat meningkat dari nilai 3,32 pada Tahun 2021 menjadi 3,37 di Tahun 2022. Nilai dasar 84,37 mutu pelayanan dikategorikan "BAIK". Nilai terendah terletak pada waktu penyelesaian dan sarana prasarana. Sedangkan nilai tertinggi pada unsur penanganan pengaduan.
Tindak lanjut hasil SKM	Bahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dengan hasil SKM yang telah dilakukan telah membuat action plan/ rencana tindak lanjut untuk mengakselerasi unsur yang nilainya masih rendah. Misalnya <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecepatan/ waktu untuk memperoleh pelayanan ditingkatkan dengan mengubah pola pelayanan tatap muka dengan menyediakan front office yang terlatih, serta melaksanakan pelatihan SIAP</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana pelayanan ditunjang dengan menambah jumlah komputer, membangun atap parkir yang lebih luas, memaksimalkan penggunaan ruang-ruang baru yang telah dibangun</li> <li>- Kemudahan prosedur untuk memperoleh pelayanan diatasi dengan meningkatkan pelayanan penyebarluasan informasi SKM, meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, dan meningkatkan sosialisasi tentang tata cara pelayanan administrasi kependudukan melalui tatap muka, website dan media sosial.</li> </ul>
Efisiensi proses mendapatkan KIA	Efisiensi yang dirasakan tentunya adalah cepatnya proses dan biaya yang murah. Inovasi SMART KIDS bekerjasama dengan sekolah karena sebagian besar data siswa (akte kelahiran dan Kartu Keluarga) sudah tersedia di sekolah, kerjasama dengan sekolah membuat pengumpulan data pengajuan penerbitan KIA secara kolektif sehingga semakin mudah, penduduk tidak perlu mendatangi kantor Dinas DUKCAPIL untuk mengajukan penerbitan KIA, proses yang cepat, dan KIA sudah terbit kemudian diserahkan kembali ke sekolah untuk didistribusikan kepada siswa.

<b>Indikator</b>	<b>Deskripsi Perubahan</b>
	Sesuai dengan SOP yang sudah disusun, waktu yang diperlukan dari pengumpulan berkas sampai dengan pendistribusian KIA melalui sekolah adalah selama 8 jam 45 menit, waktu tersebut kurang dari (<) 1 hari sehingga program inovasi ini sangat efektif dilaksanakan.
Prosentase kepemilikan dokumen kependudukan khususnya KIA di Kabupaten Balangan	Rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Balangan masih sebesar 68,89% pada tahun 2021, dengan adanya inovasi SMART KIDS kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Balangan meningkat menjadi 87,99%
Kemudahan Akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan KIA	Sebelumnya akses masyarakat terhadap dokumen administrasi kependudukan KIA belum dilakukan secara kolektif kerjasama sekolah. Dengan inovasi SMART KIDS, banyak sekali manfaat dan kemudahan yang dirasakan. Karena pengumpulan data memanfaatkan data yang sudah tersedia di sekolah, perekaman dilakukan di sekolah dan proses penandatanganan secara elektronik dan KIA yang sudah jadi didistribusikan dari sekolah. Dari jumlah sekolah yang bekerjasama/ lokus inovasi setiap tahun selalu mendapatkan apresiasi dan sambutan baik, inovasi ini mendekatkan dan memudahkan akses bagi masyarakat khususnya terhadap dokumen kependudukan KIA.

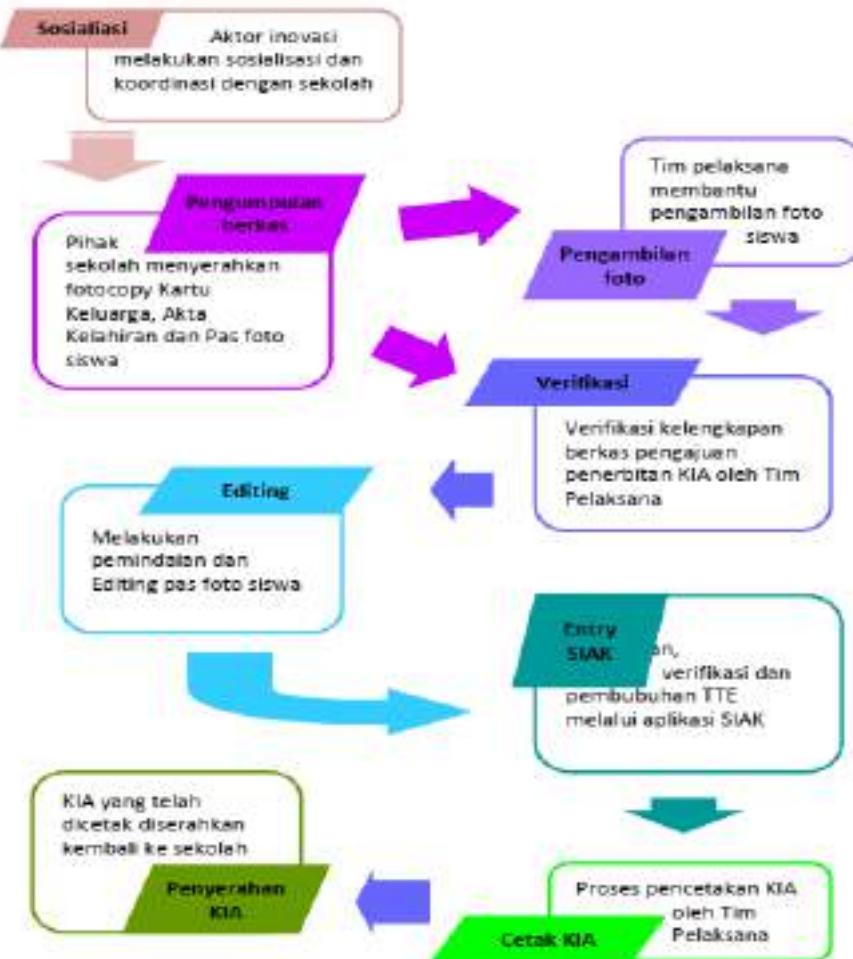
*Sumber: Hasil Analisis, tahun 2022*

### 1.3 Analisis Dampak

Secara lebih teknis tahapan inovasi SMART KIDS sesuai SOP adalah

- a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak sekolah terkait pelaksanaan inovasi
- b. Mengumpulkan berkas kelengkapan penerbitan KIA dari pihak sekolah
- c. Pengambilan pas foto siswa
- d. Melakukan verifikasi kelengkapan data (kepemilikan Akta Kelahiran)
- e. Melakukan verifikasi data SIAK: 1. Jika data SIAK sudah sesuai dengan Akta Kelahiran, dilanjutkan dengan pemindaian pas foto; 2. Jika data SIAK tidak sesuai dengan Akta Kelahiran, dilakukan updating data SIAK
- f. Melakukan update data SIAK berdasarkan Akta Kelahiran
- g. Pemberian identitas pas foto sesuai nama siswa. Jika pas foto yang dilampirkan sudah dalam bentuk digital, dilanjutkan dengan proses editing; Jika pas foto yang dilampirkan adalah hasil cetakan, dilanjutkan dengan pemindaian menggunakan scanner.
- h. Pemindaian pas foto siswa menggunakan scanner.
- i. Melakukan editing pas photo siswa dengan aplikasi sederhana (Micosoft Word dan Paint)
- j. Input data pengajuan KIA (Operator mengunggah pas foto siswa dan mengajukan penerbitan KIA melalui aplikasi SIAK
- k. Verifikasi data pengajuan KIA (verifikator melakukan verifikasi pengajuan KIA melalui aplikasi SIAK

- I. Pembubuhan TTE (Kepala Dinas membubuhkan Tanda Tangan Elektronik pada KIA yang sudah diverifikasi)
- m. Melakukan Pencetakan KIA
- n. Menyerahkan KIA kepada pihak sekolah (kolektif)



KIA, atau Kartu Identitas Anak, adalah dokumen identitas resmi yang diberikan kepada anak di Indonesia. Berikut adalah beberapa manfaat dimilikinya KIA oleh seorang anak umur kurang dari 17 tahun adalah

- a. Identifikasi dan pengakuan, KIA dapat memberikan identitas resmi kepada anak, hal tersebut membantu mengidentifikasi dan mengakui status kewarganegaraan anak. Penting untuk hak-hak dan perlindungan anak di mata hukum.
- b. Akses ke layanan publik, dengan memiliki KIA, anak memiliki akses lebih ke berbagai layanan publik (pendidikan, perawatan kesehatan, imunisasi, dan bantuan sosial). KIA dapat digunakan sebagai syarat mendapatkan hak-hak lainnya (mengikuti ujian, mendaftar sekolah, dan mendapatkan program pemerintah lain).

- c. Perlindungan hukum, KIA melindungi anak dari berbagai bentuk eksplorasi, pelecehan, atau tindakan melanggar hukum lainnya. Identitas resmi yang terdokumentasi KIA membantu mengidentifikasi anak sehingga mempermudah proses penegakan hukum jika suatu saat terjadi masalah.
- d. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, KIA mencakup informasi penting tentang anak (tanggal lahir, alamat, dan catatan kesehatan). Dokumen ini dapat digunakan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak dari waktu ke waktu, termasuk pemberian imunisasi, pencatatan pertumbuhan fisik, dan perkembangan kognitif.
- e. Dokumen identitas resmi, KIA berfungsi sebagai dokumen identitas resmi yang dapat digunakan oleh anak saat dewasa. Dalam beberapa kasus, KIA dapat menjadi persyaratan untuk mendapatkan dokumen identitas lainnya, seperti kartu identitas penduduk (KTP) atau paspor.

Untuk mengukur keberhasilan program kerjasama penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan sekolah, beberapa indikator dan metode evaluasi yang dapat digunakan selain tingkat penerbitan/ jumlah KIA yang diterbitkan, karena dengan memantau jumlah KIA yang berhasil diterbitkan, dapat diukur sejauh mana program ini telah mencapai tujuannya dalam menyediakan identitas/ dokumen kependudukan dan pencatatan sipil resmi bagi anak. Dalam hal ini Disdukcatpil telah melakukan perhitungan, dan secara kumulatif bertambah setiap tahun. Selain jumlah KIA, cara mengukur keberhasilan program dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah. Evaluasi juga dapat mencakup tingkat partisipasi sekolah dalam program yang memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan dan komitmen sekolah dalam menjalankan program SMART KIDS.

Selama ini pengukuran kepuasan pengguna inovasi SMART KIDS sudah dilakukan, yakni melalui laporan Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan Semester II Tahun 2022. Kedepannya dapat dilakukan khusus untuk inovasi SMART KIDS, agar pengukuran SKM dapat lebih spesifik lagi. Dimana melalui survei tersebut membantu mengukur tingkat kepuasan mereka terhadap layanan penerbitan KIA. Pertanyaan-pertanyaan dalam survei ini dapat berfokus pada proses penerbitan, kemudahan akses, kejelasan informasi, dan kebermanfaatan KIA, misalnya dengan daftar pertanyaan sebagai berikut

1. Seberapa mudah proses penerbitan KIA bagi Anda sebagai orang tua/siswa?
2. Seberapa jelas dan lengkap informasi yang Anda terima terkait prosedur penerbitan KIA?
3. Seberapa responsif dan membantu petugas yang melayani Anda selama proses penerbitan KIA?
4. Seberapa puas Anda dengan waktu yang diperlukan untuk menerbitkan KIA?
5. Seberapa jelas dan akurat informasi yang tercetak dalam Kartu Identitas Anak?
6. Seberapa mudah akses Anda untuk mendapatkan informasi terkait status atau perpanjangan KIA?

7. Apakah Anda merasa KIA memberikan manfaat dalam mengakses layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan?
8. Seberapa puas Anda dengan ketersediaan dan keberhasilan program kerjasama penerbitan KIA dengan sekolah?
9. Seberapa memadainya fasilitas yang disediakan selama proses penerbitan KIA?
10. Apakah Anda merasa program penerbitan KIA dengan sekolah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak?

Cara mengukur keberhasilan program selanjutnya yakni peningkatan akses anak terhadap layanan publik (pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan sosial). Mengukur peningkatan akses ini dapat melibatkan pemantauan dan pembandingan data sebelum dan setelah program dilaksanakan lintas unit yang membidangi.

Pemantauan kelengkapan data, dimana keberhasilan inovasi SMART KIDS harus meninjau substansi cakupan informasi penting tentang anak-anak di dalam keluaran KIA, seperti data pribadi, kesehatan, dan perkembangan. Mengukur tingkat kelengkapan data ini dapat membantu memastikan bahwa informasi yang tercatat dalam KIA anak-anak sudah lengkap dan akurat.

Secara lebih makro, indikator yang perlu diperhitungkan selanjutnya adalah kepatuhan hukum, khususnya dari lokus. Tingkat kepatuhan sekolah dan pihak terkait dalam melaksanakan program penerbitan KIA sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Indikator lain yang dapat dianalisis adalah jalinan kolaborasi dan koordinasi antara sekolah dan pihak terkait yang terjalin selama implementasi program SMART KIDS. Mengukur tingkat kolaborasi dan koordinasi antara sekolah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam menjalankan program ini juga penting, dimana tingkat kerjasama yang baik dapat menjadi indikator keberhasilan program. Penting untuk merencanakan evaluasi secara sistematis dan teratur untuk memantau keberhasilan program inovasi SMART KIDS. Dengan demikian dapat diidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan program dengan lebih baik.

Adapun efisiensi yang dapat diterima melalui kerjasama penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan sekolah (SMART KIDS) di antaranya:

- a. *Akses Mudah*, karena mengurangi kebutuhan orang tua atau siswa untuk pergi ke kantor penerbit KIA secara terpisah, menghemat waktu, biaya, dan tenaga.
- b. *Pengumpulan Data Terpusat*, data pribadi siswa yang diperlukan untuk KIA dapat dikumpulkan dan dikelola secara terpusat. Ini meminimalkan duplikasi dan kehilangan data, serta memudahkan proses penerbitan dan pengelolaan KIA.

- c. *Optimalisasi Sumber Daya*, karena melibatkan sekolah sebagai mitra dalam penerbitan KIA, Disdukcatpil dapat memanfaatkan infrastruktur, sumber daya manusia, dan jaringan sekolah yang sudah tersedia. Sehingga mampu mengurangi biaya dan upaya membangun infrastruktur baru atau melibatkan pihak ketiga dalam proses penerbitan.
- d. *Koordinasi yang Efektif*, antara sekolah dengan Disdukcatpil dalam memastikan anak-anak terkini dan akurat. Informasi tentang perubahan alamat, data keluarga, atau perubahan lainnya dapat cepat disampaikan dan diperbarui.
- e. *Kecepatan Pelayanan*, dimana penerbitan KIA di sekolah, membuat anak dapat direkam data langsung mendapatkan KIA, tanpa perlu menunggu antrian di kantor.
- f. *Monitoring dan evaluasi yang lebih efisien*, hasil monev adalah sekolah dan penerima manfaat memberikan umpan balik tentang proses dan hasil dari penerbitan KIA kepada Disdukcatpil. Sehingga cepat tertangani/ responsif jika terdapat kendala atau masalah yang muncul.